

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh peningkatan output nasional dapat menentukan kesejahteraan dan kemajuan perekonomian. Perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek (Ahmad Ma'ruf, 2008).

Menurut Sukirno (2010) pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan nasional yang tercermin dari peningkatan pendapatan per kapita dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang mengarah pada peningkatan output barang dan jasa sehingga menghasilkan pendapatan masyarakat meningkat (Afriliana & Wahyudi, 2022). Menurut Kuznet pertumbuhan merupakan peningkatan kapasitas jangka panjang dalam menyediakan bermacam-macam barang ekonomi untuk masyarakat. Peningkatan kapasitas ini terjadi dari adanya kemajuan teknologi, kelembagaan dan ideologi terhadap berbagai kebutuhan situasi yang ada (Ahmad Ma'ruf, 2008).

Menurut Todaro (2006), pertumbuhan ekonomi ini memiliki arti penting yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut.

1. Akumulasi modal

Akumulasi modal adalah gabungan seluruh investasi dari pendapatan yang diperoleh saat ini, yang diinvestasikan dengan tujuan mencapai keuntungan yang lebih tinggi di masa yang akan datang.

2. Populasi dan pertumbuhan angkatan kerja

Pertumbuhan populasi penduduk dikaitkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Dimana dengan meningkatnya angkatan kerja ini berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena bisa merangsang suatu perekonomian menjadi tumbuh.

3. Kemajuan teknologi

Menurut para ahli ekonom kemajuan teknologi ini merupakan bagian yang terpenting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini didukung karena adanya pengembangan teknik-teknik baru dalam menyempurnakan suatu pekerjaan dan dapat mempermudah pekerjaan (Afriliana & Wahyudi, 2022).

### **2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Adapun teori pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Dalam bukunya "*Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*", Adam Smith memperkenalkan faktor-faktor yang mengarah pada pembangunan ekonomi. Pertumbuhan populasi akan memperluas pasar, dan

perluasan pasar mendorong tingkat spesialisasi. Spesialisasi mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi, sehingga meningkatkan tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi didorong oleh persaingan antara perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000: 53). Adam Smith menggambarkan proses pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

a. Peningkatan output secara keseluruhan

Menurut Adam Smith, sistem produksi suatu negara mempunyai tiga komponen utama.

1) Sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi lahan)

Menurut Adam Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan faktor utama dalam produksi. Jumlah sumber daya alam yang tersedia mewakili batas atas pertumbuhan suatu negara, dan jika sumber daya ini kurang dimanfaatkan, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada akan mempengaruhi pertumbuhan produksi. Namun, ketika seluruh sumber daya alam telah dimanfaatkan sepenuhnya, output akan berhenti.

2) Sumber daya manusia (jumlah penduduk)

Sumber daya manusia berperan pasif dalam proses pertumbuhan produksi. Artinya penduduk menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja masyarakat.

### 3) Persediaan barang modal

Stok modal merupakan faktor produktif yang secara aktif menentukan pertumbuhan output. Perannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Output dan tingkat pertumbuhan bergantung pada tingkat pertumbuhan persediaan modal (sampai batas maksimal sumber daya alam).

#### b. Pertumbuhan Penduduk

Menurut Adam Smith, populasi akan bertambah jika tingkat upah yang berlaku berada di atas tingkat subsisten, atau tingkat upah yang cukup untuk bertahan hidup. Ketika tingkat upah naik di atas tingkat subsistem, orang akan menikah lebih muda, angka kematian turun, dan kelahiran meningkat. Sebaliknya, jika tingkat upah umum lebih rendah dari tingkat subsistem, maka jumlah penduduk akan menurun (Abrar, 2017).

## 2. Teori Keynes

Dasar pemikiran Keynes didasarkan pada gagasan klasik bahwa pembangunan ekonomi berjalan optimal tanpa campur tangan pemerintah. Faktanya, pada tahun 1930-an terjadi pengangguran massal. Teori Keynesian menggunakan pendekatan makro untuk mengatasi pengangguran. Menurut Keynes, untuk mengatasi pengangguran, perlu meningkatkan pengeluaran agar pengusaha meningkatkan investasinya sehingga akan berdampak meningkatkan permintaan akan tenaga kerja (Wahyudi, 2020).

Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus berinvestasi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong kesempatan kerja penuh,

stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Keynes menyarankan bahwa untuk melawan depresi dan resesi ekonomi, belanja pemerintah harus ditingkatkan atau pajak harus dipotong, yang dapat meningkatkan belanja konsumsi sektor swasta. Menurut Pelley (1996) Teori dasar Keynes menyatakan bahwa akumulasi modal didorong oleh investasi dan tingkat pertumbuhan output harus sesuai dengan tingkat permintaan agregat, sehingga berpotensi mempengaruhi tingkat pertumbuhan output (Agustina, 2019).

Keynes memperkenalkan jumlah output perekonomian yang diminta yaitu meliputi pengeluaran sektor rumah tangga yang digambarkan oleh konsumsi masyarakat ( $C$ ), pengeluaran sektor swasta yang digambarkan melalui investasi-investasi yang dilakukan oleh pengusaha ( $I$ ), pengeluaran sektor pemerintah yang digambarkan oleh pengeluaran pemerintah ( $G$ ) dan pengeluaran perdagangan luar negeri yang digambarkan melalui selisih ekspor impor yang disebut ekspor bersih ( $NX = X - M$ ). Jumlah output perekonomian yang diminta ini disebut sebagai permintaan agregat yang memiliki persamaan sebagai berikut.

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Model ini menjelaskan bahwa ketika konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan net ekspor mengalami peningkatan akan menyebabkan meningkatnya produksi barang dan jasa. Sehingga dengan meningkatnya produksi barang dan jasa ini akan menyebabkan PDB meningkat. Dengan meningkatnya PDB ini akan membuat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya,

apabila konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan net ekspor menurun, maka akan menyebabkan produksi barang dan juga menurun sehingga akan menyebabkan penurunan PDB dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga menjadi rendah (Agustina, 2019).

Keynes juga memperkenalkan konsep baru yaitu angka pengganda (*multiplier*). Konsep ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan investasi akan menyebabkan *full employment*. Adanya kenaikan investasi maupun pengeluaran pemerintah akan menyebabkan peningkatan pengeluaran agregat berkali-kali lipat (Skousen, 2015). Adapun persamaan konsep ini adalah sebagai berikut.

$$k = \frac{1}{1-MPC}$$

Dimana MPC merupakan *Marginal Propensity to Consume* (kecenderungan maginal untuk mengonsumsi) (Agustina, 2019).

### 3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Teori Harrod-Domar ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang. Para peneliti menggunakan pendekatan *aktual growth rate* (Gn) dan *warranted rate of growth* (Gw). *Aktual growth rate* (Gn) berarti tingkat pertumbuhan yang dijamin atau pertumbuhan aktual dan mengacu pada tingkat kenaikan pendapatan pada kapasitas maksimum perekonomian. Sedangkan , *warranted rate of growth* (Gw) mengacu pada tingkat pertumbuhan alamiah yang dianggap Harrod sebagai "kesejahteraan optimal" yang dikenal sebagai tingkat pertumbuhan potensial atau tingkat pertumbuhan

lapangan kerja penuh. Dalam pengertian ini,  $G_n$  dan  $G_w$  bertujuan untuk mengukur derajat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan menghitung PDB berdasarkan harga berlaku sebagai  $G_n$  dan Harga konstan sebagai  $G_w$ .

Model pertumbuhan Harrod-Domar didasarkan pada pengalaman negara-negara maju. Semuanya terutama ditujukan pada negara-negara dengan kapasitas produktif yang maju dan berupaya mempertimbangkan persyaratan untuk pertumbuhan yang stabil di negara-negara tersebut. Teori ini dikembangkan sekitar waktu yang sama oleh Harrod (1948) di Inggris dan Domar (1957) di Amerika. Walaupun menggunakan proses komputasi yang berbeda, namun menghasilkan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengungkapkan gagasan yang sama. Oleh karena itu, teori ini disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes berpikir dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Model ini dijelaskan dengan asumsi sebagai berikut:

$$\text{Laju pertumbuhan ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (pertumbuhan stabil) dalam jangka panjang. Baik Harrod maupun Domar tertarik untuk mengetahui peningkatan pendapatan yang diperlukan untuk kehidupan yang lancar dan tidak tersendat-sendat. Meskipun kedua model berbeda dalam detailnya, namun kesimpulannya hampir sama. Harrod dan Domar mengemukakan bahwa investasi memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, terutama mengingat sifat ganda dari investasi. Pertama,

hal ini menghasilkan pendapatan dapat dikatakan ini sebagai dampak permintaan dari investasi dan kedua, hal ini memperluas kapasitas produktif perekonomian dengan meningkatkan persediaan modal ini dapat disebut sebagai dampak penawaran. Oleh karena itu, selama investasi netto terus berlanjut, maka pendapatan riil dan output akan terus meningkat. Namun, untuk mempertahankan tingkat ekuilibrium pendapatan pada kesempatan kerja penuh dari tahun ke tahun, baik pendapatan riil maupun output harus tumbuh pada tingkat yang sama dengan kapasitas produktif modal. Jika tidak, perbedaan apapun antara kedua nilai tersebut akan mengakibatkan kelebihan atau kapasitas menganggur. Hal ini memaksa pengusaha untuk membatasi belanja modalnya, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap perekonomian. Ini berarti bahwa pendapatan dan lapangan kerja menurun pada periode berikutnya, serta mendorong perekonomian keluar dari jalur keseimbangan pertumbuhan yang stabil.

Mempertahankan lapangan kerja dalam jangka panjang memerlukan peningkatan investasi yang konstan. Hal ini juga mengharuskan pendapatan riil terus bertumbuh cukup cepat agar dapat memanfaatkan sepenuhnya stok modal yang terus bertambah. Tingkat pertumbuhan pendapatan yang diperlukan ini disebut tingkat pertumbuhan terjamin (*warranted rate of growth*) atau tingkat pertumbuhan kapasitas penuh (Suprijati & Yakin, 2017).

## **2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**

### **2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**

Pertumbuhan merupakan syarat utama bagi pertumbuhan inklusif. Klasen (2010) mengungkapkan bahwa penting untuk menentukan perekonomian seperti apa yang menunjukkan karakteristik pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan inklusif memiliki konsep berbeda mengenai cara kerja pertumbuhan dalam suatu perekonomian. Menurut Klasen (2010), pertumbuhan bersifat inklusif dalam beberapa hal, namun tidak dalam beberapa hal lainnya. Pertumbuhan inklusif dapat dikatakan sebagai ukuran apakah pertumbuhan ekonomi mampu menjamin pemerataan akses terhadap peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat melihat situasi setiap orang. Pertumbuhan inklusif sering kali berfokus pada penciptaan peluang ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang dapat diakses oleh semua pihak dan memungkinkan semua orang berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi (Ali dan Zhuang, 2007). United Nations Development Program (2007) mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan dimana seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat yang sama dari pertumbuhan tersebut (Prasetyia, 2021).

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2023) pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pembangunan ekonomi yang menciptakan pemerataan akses dan peluang pada seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Konsep pertumbuhan inklusif bermula dari kenyataan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia namun dibarengi dengan meningkatnya

ketimpangan pendapatan (Klasen, 2010). Fenomena ini muncul di negara-negara berkembang di Asia pada tahun 1960an, yang menyoroti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan. Pada periode ini, negara-negara berkembang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak mampu mengurangi ketimpangan (Todaro dan Smith, 2011). Kondisi tersebut yang mengubah pandangan ekonomi tradisional yang mempercayai bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi (Prasetyia, 2021).

#### **2.1.2.2 Pilar Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**

Indeks pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai alat untuk mengukur inklusivitas pembangunan Indonesia melalui aspek-aspek pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, kemiskinan, akses dan peluang. Angka indeks tersebut terdiri dari tiga pilar dan delapan sub pilar serta 21 indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.

##### **1. Pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi**

Pilar ini terdiri dari sub-pilar yaitu pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan infrastruktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terdiri dari indikator pertumbuhan PDRB riil per kapita, share manufaktur terhadap PDRB dan rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal. Indikator dari kesempatan kerja yaitu tingkat kesempatan kerja, persentase penduduk bekerja penuh, dan persentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas. Serta indikator infrastruktur ekonomi yaitu persentase rumah tangga yang

menggunakan listrik/PLN, persentase penduduk yang memiliki telepon genggam, dan persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang.

## 2. Pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan

Pilar ini terdiri dari sub-pilar ketimpangan dan kemiskinan. Indikator ketimpangan yaitu rasio pendapatan gini, sumbangan pendapatan perempuan dan rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota, sedangkan indikator kemiskinan yaitu persentase penduduk miskin dan rata-rata konsumsi protein per kapita perhari

## 3. Pilar perluasan akses dan kesempatan

Pilar ini terdiri dari sub-pilar kapabilitas manusia, infrastruktur dasar dan keuangan inklusif. Indikator kapabilita manusia yaitu angka harapan lama sekolah, persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, dan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Indikator infrastruktur dasar meliputi persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak dan persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri. Serta indikator keuangan inklusif yaitu rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk usia produktif dan rasio kredit perbankan UMKM.

### **2.1.2.3 Mengukur Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi inklusif ini menggunakan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif. Menurut Bappenas (2023) indeks pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan alat atau cara mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Pengukuran pertumbuhan inklusif ini dikemukakan oleh Klasen (2010) yaitu metode *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR) yang diadaptasi dari penelitian Kakwani dan Son tahun 2008. Penggunaan metode ini untuk mengukur manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin. Misalkan ukuran kemiskinan adalah fungsi dari garis kemiskinan  $z$ , mak rata-rata pendapatan  $\mu$ , dan Kurva Lorenz dengan  $L(p)$  adalah sebagai berikut:

$$P = P(z, \mu, L(p))$$

Apabila ukuran kemiskinannya digunakan sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

$$\alpha = 0, 1, 2$$

$y_i$  = pendapatan penduduk ke  $i$

$q$  = jumlah penduduk miskin

Adapun perubahan penduduk miskin dapat dituliskan sebagai berikut.

$$P_{12} = P_2 - P_1 = L_n [ P (z, \mu_2, L_2(p)) ] - L_n [ P (z, \mu_1, L_1(p)) ]$$

Nilai  $P_{12}$  ada komponen pertumbuhan dan distribusi, apabila  $\mu_1$  dan  $\mu_2$  adalah rata-rata pendapatan penduduk periode 1 dan 2, maka pertumbuhan pendapatan penduduk adalah sebagai berikut.

$$\hat{y} = L_n (\mu_2) - L_n (\mu_1)$$

Total elastisitas kemiskinan berkaitan dengan pertumbuhan dan kemiskinan yang berhubungan dengan ketimpangan. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut.

$$\hat{\delta} = (Ln [P (z, \mu_2, L_2(p))] - Ln [P(z_1, \mu_1, L_1(p))])\hat{y}$$

dan,

$$\hat{\delta} = \hat{\Pi} + \hat{\varphi}$$

Sedangkan elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan dirumuskan sebagai berikut.

$$\frac{1}{2_y} [Ln [P (z, \mu_2, L_1(P))] - Ln [P (z, \mu_2, L_1(P))] + \\ Ln [P (z, \mu_2, L_2(P))] - Ln [P (z, \mu_1, L_2(P))]$$

Kemudian elastisitas kemiskinan terhadap ketimpangan adalah sebagai berikut.

$$\frac{1}{2_y} [Ln [P (z, \mu_2, L_1(P))] - Ln [P (z, \mu_1, L_1(P))] + \\ Ln [P (z, \mu_2, L_2(P))] - Ln [P (z, \mu_1, L_2(P))]$$

Berdasarkan dari hasil di atas, maka rumus PEGR adalah sebagai berikut.

$$PEGR = \hat{y} * = (\hat{\delta} / \hat{\Pi}) \hat{y}$$

Adapun nilai PEGR dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Apabila  $\hat{y} * = \hat{y}$  artinya bersifat netral
2. Apabila  $\hat{y} * > \hat{y}$  artinya pertumbuhan inklusif bersifat *pro poor growth*

3. Apabila  $\hat{y}^* < \hat{y}$  artinya pertumbuhan belum bersifat *pro poor growth*

Berdasarkan dari hasil penjelasan PEGR di atas, maka pertumbuhan ekonomi inklusif dirumuskan sebagai berikut.

$$IG_{ij} = \frac{E_{ij}}{E_i} E_j$$

Dimana:

$IG_{ij}$  = Indeks pertumbuhan inklusif

$E_{ij}$  = Pertumbuhan kelompok i dalam kaitannya dengan indikator j

$E_j$  = Pertumbuhan indikator j

Dimana dalam hal ini i menunjukkan pada kelompok penduduk miskin dan j menunjukkan pada indikator yang bersangkutan (Afriliana & Wahyudi, 2022).

### **2.1.3 Pengeluaran Pemerintah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah**

Menurut Mankiw (2007), pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen permintaan agregat karena ketika pengeluaran pemerintah meningkat maka permintaan agregat juga meningkat. Selain itu, peran belanja pemerintah di negara-negara berkembang juga sangat penting. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan produk domestik bruto (PDB), sehingga peningkatan permintaan berarti pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal menurut Sadono Sukirno (2006) yaitu tindakan pemerintah untuk mengatur kegiatan

perekonomian melalui penetapan pendapatan dan belanja negara tahunan, yang tercermin dalam dokumen APBN nasional dan APBD daerah. Tujuan kebijakan fiskal ini adalah untuk menstabilkan harga, tingkat produksi, kesempatan kerja, dan merangsang pertumbuhan ekonomi (Koyongian dkk., 2019).

Rakhmah Sania (2019) Pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi untuk membiayai sarana dan prasarana transportasi, pertanian, irigasi, serta energi yang dapat mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi adalah untuk mendukung strategi kebijakan pemerintah yang ditujukan pada pembangunan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur, perkembangan teknologi dan informasi, serta peningkatan akses permodalan dan daya saing UMKM dan koperasi (Yuliana dkk, 2023).

### **2.1.3.2 Teori Pengeluaran Pemerintah**

Adapun teori-teori tentang pengeluaran pemerintah adalah sebagai berikut.

#### **1. Aldof Wagner**

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan aktivitas pemerintah akan selalu mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Wagner menyatakan bahwa dalam ilmu ekonomi, ketika pendapatan per kapita meningkat maka pengeluaran publik meningkat secara proporsional, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan-hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, hiburan, budaya, dan lain-lain. Semakin besar pengeluaran pemerintah maka akan memberikan dampak terhadap pertahanan dan keamanan, kesejahteraan dan Pembangunan (Susanti dkk, 2019).

## 2. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada analisis pengeluaran dan pendapatan sektor publik. Pemerintah selalu berusaha meningkatkan pengeluarannya, dengan meningkatkan penerimaan pajak, meskipun masyarakat tidak suka membayar pajak yang tinggi untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang terus meningkat. Peningkatan penerimaan pajak juga meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dalam kondisi normal, pertumbuhan PDB meningkatkan pendapatan sektor pemerintah dan meningkatkan pengeluaran sektor publik.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teorinya bahwa masyarakat mempunyai toleransi pajak tertentu, tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pajak yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian masyarakat memahami bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan pemerintahan, sehingga mempunyai kemauan masyarakat untuk membayar pajak. Toleransi ini membuat pemerintah tidak bisa seenaknya meningkatkan pungutan pajak. Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek pergantian (*displacement effect*) yaitu adanya kekacauan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan ke aktivitas negara.

### **2.1.4 Pendapatan Per Kapita**

#### **2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Per Kapita**

Menurut BPS (2023) pendapatan per kapita atau PDRB per kapita merupakan pendapatan regional yang dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. Menurut Todaro (2003) PDB per kapita merupakan ukuran kemajuan

pembangunan. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga pertumbuhan pendapatan menjadi ukuran kemajuan pembangunan. Menurut Ginting (2008), pembangunan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita sebagai tolak ukur dalam menentukan pembangunan ekonomi, peningkatan produktivitas per kapita melalui *capital endowment* dan peningkatan keterampilan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita (Mahendra, 2017).

Salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita. Nilai pendapatan yang tinggi tidak selalu berarti lebih kaya dibandingkan daerah yang berpendapatan rendah, karena jumlah penduduk menentukan besarnya tingkat pendapatan. Adapun persamaan dalam menghitung pendapatan per kapita adalah sebagai berikut.

$$\text{Pendapatan Per Kapita} = \frac{PDRB}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

#### **2.1.4.2 Teori Pendapatan Per Kapita**

Teori pendapatan per kapita salah satunya adalah teori Maltus. Menurut Maltus (2015) peningkatan persediaan pangan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, tinggi dan tidak terkendali, sehingga dalam keadaan ini pendapatan per kapita yaitu di pedesaan dinyatakan dengan produksi pangan per kapita akan menjadi sangat kecil dan akibatnya populasi tidak pernah stabil. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendapatan per kapita

berdampak pada ketidakstabilan jumlah penduduk yang berujung pada peningkatan pengangguran (Elia & Marselina, 2023).

## **2.1.5 Investasi**

### **2.1.5.1 Pengertian Investasi**

Menurut Sukirno (2002), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan atas penanaman modal atau usaha untuk membeli barang modal dan peralatan produksi guna meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Tingkat investasi dalam kegiatan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor seperti suku bunga, tingkat pendapatan, kemajuan teknologi, dan prediksi kondisi perekonomian di masa depan. Mankiw (2003) menyatakan bahwa fungsi investasi mengacu pada jumlah yang diinvestasikan atau tingkat bunga riil. Suku bunga adalah biaya pinjaman, jadi investasi bergantung pada suku bunga riil. Fungsi investasi menurun. Ketika suku bunga naik, jumlah proyek investasi yang menguntungkan menurun (Purnomo, 2015).

### **2.1.5.2 Teori Investasi**

Ada beberapa teori tentang investasi (Khakim, 2022) yaitu sebagai berikut.

#### **1. Teori *Marginal Efficiency of Capital* dari Keynes**

Menurut Keynes, investasi tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat bunga tetapi juga oleh potensi keuntungan yang diharapkan dari sejumlah investasi, hal ini oleh Keynes disebut sebagai *Marginal Efficiency of Capital* (MEC). secara rasional investasi yang dilakukan oleh pengusaha ketika keuntungan yang diharapkan (MEC) melebihi tingkat bunga. Dengan demikian investasi

akan meningkat atau menjadi lebih besar. Jika tingkat bunga lebih tinggi daripada keuntungan yang diharapkan (MEC), maka investasi tidak akan dilakukan. Dampaknya adalah penurunan atau semakin rendahnya investasi. Apabila keuntungan yang diharapkan (MEC) sebanding dengan tingkat bunga, maka pelaksanaan investasi dapat terjadi atau tidak terjadi. Jika perusahaan memiliki tujuan sosial, investasi akan dianggap layak. Namun, jika perusahaan hanya berorientasi pada keuntungan, investasi tidak akan dilakukan.

## 2. Teori Harrod Domar

Sadono (2008) mengemukakan bahwa Teori Harrod-Domar berpendapat bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan meningkatkan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan/atau jasa, serta pengeluaran yang akan meningkatkan permintaan efektif seluruh masyarakat. Apabila pada suatu periode tertentu tercapai pembentukan modal pada tingkat tertentu, maka pada periode berikutnya perekonomian akan mampu memproduksi lebih banyak barang dan/atau jasa.

### **2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka**

#### **2.1.6.1 Pengertian Pengangguran**

Nanga (2005: 249) mengartikan pengangguran sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam kategori angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan tidak aktif mencari pekerjaan. Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan

kerja (15-64 tahun) ingin mendapatkan pekerjaan namun belum berhasil (Basrowi dkk., 2018).

Menurut Dongoran dkk (2016) pengangguran terbuka adalah pengangguran baik yang bersifat sukarela (orang yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun terpaksa (orang yang ingin bekerja tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan). Pengangguran ini diakibatkan ada orang yang menganggur karena tidak dapat memperoleh pekerjaan meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, dan ada pula yang malas karena terlalu malas mencari pekerjaan atau terlalu malas bekerja. Dapat disimpulkan bahwa pengertian pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk dalam penduduk usia kerja yang tidak bekerja dalam jangka waktu tertentu, siap untuk bekerja dan sedang mencari pekerjaan (Basrowi dkk., 2018). Sedangkan tingkat pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistik (2023) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja, atau dapat dituliskan sebagai rumus berikut.

$$TPT = \frac{\text{Penduduk yang menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Adapun pengangguran terbuka ini mencakup:

1. Pengangguran yang sedang mencari pekerjaan
2. Orang yang menganggur dan bersiap memulai usaha
3. Orang yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mempunyai pekerjaan dan tidak dapat memperoleh informasi.
4. Orang yang sudah bekerja tetapi belum mulai bekerja.

### 2.1.6.2 Dampak Pengangguran

Menurut Basrowi dkk (2018) dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara dalam adalah sebagai berikut.

1. Pengangguran dapat menjadi penghambat suatu masyarakat untuk memaksimalkan tingkat kesejahteraan yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran dapat menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai suatu masyarakat lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan potensial (*income* yang seharusnya). Dengan demikian, kesejahteraan yang dicapai masyarakat akan semakin berkurang.
2. Pengangguran dapat mempengaruhi pendapatan nasional dari sisi pajak. Hal ini terjadi karena tingginya angka pengangguran akan menyebabkan menurunnya aktivitas perekonomian sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat. Dengan begitu, jumlah pajak yang harus dibayar masyarakat akan berkurang. Apabila penerimaan pajak menurun maka modal pemerintah untuk kegiatan perekonomian juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan akan terus menurun.
3. Pengangguran tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat sehingga berdampak pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang manufaktur. Keadaan ini tidak merangsang investor (pengusaha) untuk mengembangkan atau menciptakan industri baru. Dengan cara ini, tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terpacu.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia (Shem Dwi Nehemia dan Ferry Prasetya, 2023)	Tingkat Penganguran Terbuka dan Analisi Regresi Data Panel	Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Belanja Infrastruktur Pemerintah	Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Hasil ini juga didukung oleh hasil analisis variabel kontrol, bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka dan peningkatan belanja infrastruktur pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.	Journal Of Development Economic And Social Studies Volume 2 No 1 Tahun 2023
2	Analisis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Ekonomi	Pengeluaran Pemerintah Fungsi Ekonomi	Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan, Pengeluaran	Pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pilar 1, sedangkan	INDEPENDENT : Journal Of Economics : E-ISSN : 2798-5008 Page 69-78

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Inklusif Pilar 1 Di Provinsi Jawa Tengah  (M. Ahsanul Faizin Dan Prayudi Setiawan Prabowo, 2022)		Pemerintah Fungsi Pendidik, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pilar 1, data <i>cross</i> <i>section</i> , dan analisis regresi berganda	pengeluaran pemerintah pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusi pilar 1.	fungsi negatif inklusi
3	Apakah Dana Desa dan Pendapatan APBD Memperengaruhi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia?  (Pardomuan Sihombing dan Dyah Purwanti, 2022)	Pertumbuhan ekonomi inklusi, regresi data panel	PAD, Pendapatan Pajak, DAU, DAK, dan Dana Desa	Secara PAD, Pajak, DAU, DAK, dan Dana Desa Berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusi. Secara parsial PAD, Pendapatan Pajak, DAU, DAK, dan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusi.	simultan Pendapatan DAU, DAK, Dana Desa indeks inklusi. No. 2 September 2022 P-ISSN 1411- 8637 E-ISSN 2550-1178 DOI: <a href="https://doi.org/10.31294/jp.v17i2">https://doi.org/10.31294/jp.v17i2</a>
4	Analisis Indikator Ketimpangan Gender dan	Pertumbuhan ekonomi inklusi, data panel	Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama	AHH, RLS, Pengeluaran Kapita Perempuan berpengaruh signifikan	dan Per dari hlm 151-162 positif

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Relevansinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia  (Nadila Dwi Adika dan Farida Rahmawati, 2021)		Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita	terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, sedangkan pengeluaran dari laki-laki hanya Pengeluaran Per Kapita yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, untuk AHH dan RLS tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif	ISSN p: 2620-6102 e: 2615-5575
5	Analisis Dampak Globalisasi, Kebijakan Fiskal, Dan Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif : Studi Kasus Dengan Data Panel Pada 9 Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur	Model Regresi Data Panel	Keterbukaan Perdagangan, presentase pengeluaran kesehatan, presentase pendidikan, presentase pengeluaran pendidikan, PMA dan IPM	Variabel Keterbukaan Perdagangan, Presentase Pengeluaran Kesehatan, presentase Pengeluaran Pendidikan dan IPM berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Kalimantan Timur.	PMA, BESTARI: Buletin Statistika dan Aplikasi Terkini, Volume I No. 2, 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	(Rezaner i Noer Fitrianas ari, 2021)					
6	Analisis Spasial Determinan Pertumbuhan Inklusif Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017  (Tju Ji Long & Ernawati Pasaribu, 2020)	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Inflasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, pengeluaran pemerintah fungsi perlindungan sosial, dan model regresi spasial yaitu model SAR dan model SEM	Pembentukan Tetap Bruto pengeluaran pemerintah perlindungan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi UMK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusi, sedangkan pemerintah pendidikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusi	Modal dan fungsi sosial positif inklusi, negatif Inflasi fungsi tidak terhadap inklusi	Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam Mendukung Implementasi SDG's
7	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan	Pengeluaran pemerintah kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan	bidang positif	Jurnal Ekonomi & Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port pertumbuhan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Indonesia a  (Yuniar Sri Hartati, 2021)		pengelua- ran pemerint- ah bidang kesehata- n, <i>time</i> <i>series</i> , an- alisis regresi linier berganda	ekonomi perngeluaran pemerintah pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.	inklusif, bidang negatif          tidak	Numbay Jayapura p-ISSN : 2086-4515   e-ISSN : 2746-1483 Volume 12, Nomor 1, Juli 2021 Ejurnal.Stie- Portnumbay. Ac.Id
8	Pengaruh desentral- isasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisita- s fiskal terhadap pertumb- uhan inklusif Indonesia a  (Resi Salma Nazikha & Farida Rahmaw- ati, 2021)	Pertumb- uhan Ekonomi Inklusif, analisis regresi data panel	Desentra- lisasi Fiskal, Kapasita- s Fiskal Daerah, dan Elastisita- s Fiskal	Desentralisasi Fiskal dan Kapasitas Fiskal Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, sedangkan Elastisitas Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif	Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan, 1(2), 2021, 120-134 ISSN: 2798- 1193 (online) DOI: 10.17977/um 066v1i22021 p120-134	
9	Pengaruh Belanja Pemerint- ah Dan Indeks Pembang	Belanja Pemerint- ah Fungsi Ekonomi , dan Analisis	Belanja Pemerint- ah Fungsi Pendidik- an,	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah fungsi kesehatan serta IPM berpengaruh positif	Journal Of Development Economi And Social Studies	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	unan Manusia Terhadap Indeks Pembang unan Ekonomi Inklusif	Regresi Data Panel	Belanja Pemerint ah Fungsi Kesehata n dan IPM	dan signifikan terhadap IPEI, selain itu belanja pemerintah fungsi ekonomi dan pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan	Volume 2 No 4 Tahun 2023
	(Israf Ilyas dan Ferry Prasetya , 2023)				
10	Analisis Pertumb uhan Ekonomi Inklusif: Studi Kompara si Antar Provinsi Di Indonesi a  (Shinta Nadia Afriliana & Setyo Tri Wahyudi , 2022)	Pertumb uhan Ekonomi Inklusif, Pendapat an Per Kapita, Data panel	Anggara n belanja pendidik an, anggaran belanja kesehata n, Penanam an Modal Dalam Negeri (PMDN/ DDI), Penanam an Modal Asing (FDI) PEGR, Generali ze Methode of Moment Arellano Bond (GMM – AB)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peertumbuhan ekonomi di Indonesia masih belum sepenuhnya inklusif. Pada penelitian ini pendapatan per kapita, anggaran belanja pendidikan, anggaran belanja kesehatan, dan FDI memiliki pengaruh terhadap munculnya pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Sedangkan DDI merupakan variabel yang tidak mendukung munculnya pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.	Journal Of Development Economic And Social Studies Volume 1 No 1 Tahun 2022
11	Analisis Dampak Kebijaka	Pertumb uhan Ekonomi	Persentas e pengelua	Persentase pengeluaran pemerintah fungsi	Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	n Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2015- 2020  (Rezaneri Noer Fitrianasari, Khusnul Chotimah, Dan Olivia Vebi Arnida, 2022)	Inklusif, analisis data panel	ran pendidikan, an, Indeks Kemandirian Fiskal Daerah, tingkat inflasi, tingkat keterbukaan ekonomi, Pembentukan Modal Tetap Bruto	pendidikan, inflasi, keterbukaan ekonomi, pembentukan tetap berpengaruh signifikan dan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Pulau Sumatera	Publik, Vol. 7 (1), Januari 2022 Dikirim: 10 Desember 2021; Diterima: 12 Desember 2021 ISSN: 2527- 2772
12	<i>The Determinants of Inclusive Economic Growth in Yogyakarta</i>  (Ibnu Hidayat, Sri Mulatsih dan Wiwiek Rindayati, 2020)	Pendapatan per kapita	Konsumsi rumah tangga, investasi asing, investasi domestik dan rata-rata lama sekolah.	Analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif adalah konsumsi rumah tangga, ekspor barang/jasa, investasi asing, investasi domestik, pendapatan perkapita, dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah tingkat pengangguran	Jurnal Economia, Vol. 16, No. 2, October 2020, 200- 210. P-ISSN: 1858-2648 E-ISSN: 2460-1152

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				terbuka dan impor barang/jasa.	
13	Pertumbuhan Inklusif Di Provinsi Sulawesi Selatan Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya  (Azwar, 2016)	Pengangguran	PDRB, indeks kesehatan, pendidikan, belanja daerah dan jumlah penduduk miskin	Faktor kesehatan dan belanja daerah terbukti pengaruh terhadap pertumbuhan inklusif. Sementara faktor lainnya, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendidikan, dan jumlah penduduk miskin justru terbukti memiliki pengaruh yang negatif.	Jurnal BPPK Volume 9 Nomor 2 Tahun 2016
14	Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur.  (Meilissa Ike Dien Safitri, Candra Fajri Ananda dan Ferry Prasetya, 2021)	Belanja fungsi ekonomi, PDRB per kapita dan Tingkat Pengangguran Terbuka.	Belanja fungsi kesehatan, belanja fungsi pendidikan, an,	. Hasil penelitian menunjukkan jika belanja ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada jangka panjang, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif. Pada jangka pendek, belanja fungsi kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, akan tetapi belanja fungsi ekonomi, PDRB per kapita,	Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 6(2), 85-96.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.	
15	Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)  (Nurul Hasby Hilmy Amin dan Nurman Setiawan Fadjar, 2023)	Pendapatan per kapita	Upah minimum dan IPM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, sedangkan variabel indeks pembangunan manusia dan pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.	Journal Of Development Economic And Social Studies Volume 2 No 3 Tahun 2023

## **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari sebuah penelitian yang disusun dari teori-teori, observasi, fakta serta kajian pustaka. Berikut merupakan hubungan antar antar variabel independen dengan variabel dependen.

### **2.3.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**

Pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi yang meningkat merupakan suatu cara untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar masyarakat di suatu wilayah seperti memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar dapat memiliki keahlian sehingga diharapkan dapat memiliki pekerjaan. Dengan begitu tingkat kemiskinan dan ketimpangan akan menurun karena masyarakat yang bekerja akan memiliki pendapatan sehingga masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta output barang dan jasa juga akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilyas dan Prasetya (2023) menghasilkan bahwa belanja pemerintah fungsi ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri dkk (2021) menunjukkan bahwa belanja pemerintah fungsi ekonomi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Faizin dan Prabowo (2022) menunjukkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pilar 1. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti

dkk (2021) menunjukkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan inklusif dalam kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Azwar (2016) menunjukkan bahwa belanja pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap indeks pertumbuhan inklusif.

### **2.3.2 Hubungan Pendapatan Per Kapita dengan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**

Pendapatan per kapita merupakan salah satu tolak ukur untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Besarnya tingkat pendapatan per kapita menggambarkan besarnya nilai PDB dan banyaknya masyarakat yang bekerja. Oleh karena itu, meningkatnya pendapatan per kapita akan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, dan sebaliknya ketika pendapatan per kapita menurun maka tingkat kemiskinan dan ketimpangan juga meningkat, maka dengan begitu pertumbuhan ekonomi inklusif akan tetap rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Afriliana dan Wahyudi (2022) menunjukkan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh terhadap munculnya pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyia (2021) menunjukkan bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Amin dan Fadjar (2023) menunjukkan hasil bahwa pendapatan per kapita berpengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh I. Hidayat dkk (2020) menunjukkan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan

ekonomi inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri dkk (2021) menunjukkan hasil bahwa PDRB per kapita dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan dalam jangka pendek PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

### **2.3.3 Hubungan Investasi dengan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**

Dengan adanya investasi akan menciptakan akumulasi modal sehingga jumlah produksi akan meningkat dan lapangan pekerjaan akan tercipta juga, sehingga masyarakat yang menganggur akan bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Dengan banyaknya masyarakat yang berkeja akan akan banyak masyarakat yang mendapatkan upah, dimana upah tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, masyarakat yang bekerja akan dapat untuk mengurangi tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan antar wilayah tersebut karena hampir kebanyakan masyarakat memiliki pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nehemia dan Prasetya (2023) menghasilkan bahwa penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Prawesti (2023) menunjukkan hasil bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangaunan ekonomi inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Setiadi (2019) menunjukkan hasil bahwa investasi modal swasta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Afriliana dan Wahyudi (2022) menunjukkan hasil bahwa FDI berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif sedangkan DDI memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh I. Hidayat dkk (2020) menunjukkan hasil bahwa investasi asing dan investasi domestik memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

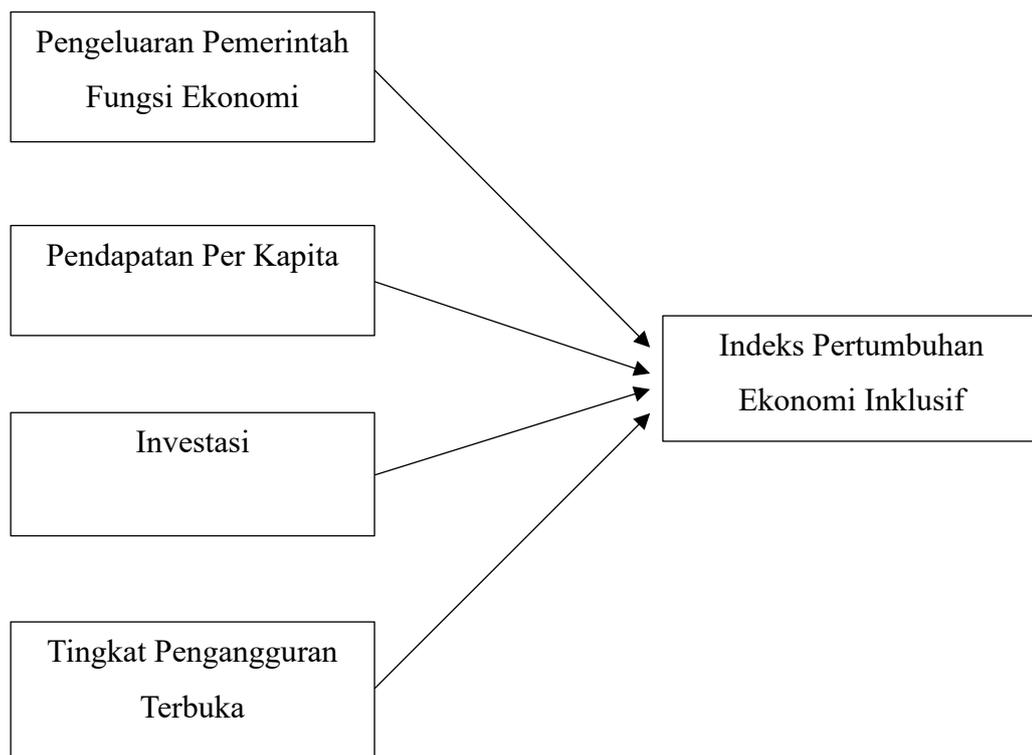
#### **2.3.4 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**

Tingkat pengangguran merupakan permasalahan yang serius dalam suatu negara, hal ini dikarenakan seseorang yang menganggur tidak akan memiliki pendapatan. Tentu ini akan menyebabkan masyarakat tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena masyarakat tidak memiliki kemampuan daya beli. Oleh karena rendahnya tingkat pengangguran akan menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berkurang, serta akan meningkatkan output yang dihasilkan oleh negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartati (2021) menghasilkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dkk (2021) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri dkk (2021) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dalam jangka pendek memiliki pengaruh yang negatif sedangkan dalam jangka panjang tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Nehemia dan Prasetya (2023) menunjukkan hasil bahwa tingkat pengangguran terbuka

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Azwar (2016) menunjukkan hasil bahwa pengangguran memiliki pengaruh yang negatif terhadap indeks pertumbuhan inklusif.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka penelitian ini akan menganalisis variabel pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi, pendapatan per kapita, investasi dan tingkat pengangguran terhadap indeks pertumbuhan ekonomi inklusif. Adapun kerangka pemikirannya sebagai berikut.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan yang belum terbukti sepenuhnya dan masih bersifat sementara. Dalam penelitian, hipotesis digambarkan sebagai pernyataan yang dibuat oleh peneliti tentang hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas (Nehemia & Prasetya, 2023). Dalam statistik, hipotesis adalah pernyataan suatu parameter populasi, dimana parameter populasi tersebut mewakili variabel-variabel yang ada dalam populasi dan dihitung menggunakan statistik sampel.

Berdasarkan dari tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Diduga variabel pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi, pendapatan per kapita dan investasi berpengaruh positif sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap indeks pertumbuhan ekonomi inklusif di Pulau Jawa tahun 2013-2021.
2. Diduga variabel pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi, pendapatan per kapita, investasi dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pertumbuhan ekonomi inklusif di Pulau Jawa tahun 2013-2021.